

ANALISIS PENENTUAN PUSAT IBU KOTA KABUPATEN KEPULAUAN AMBON SEBAGAI CALON DAERAH OTONOMI BARU KECAMATAN SALAHUTU

Adnan Affan Akbar Botanri¹, Rifyan Ruman Polpoke², Usman Gumanti Layn³

^{1, 2, 3}Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Maluku, Indonesia

Email: abotanri@gmail.com

Article History

Received: 25-03-2024

Revision: 20-04-2024

Accepted: 27-04-2024

Published: 30-04-2024

Abstract. The expansion of Salahutu and Leihitu sub-districts into candidates for the new autonomous region of Ambon Islands Regency has become an interesting issue in recent years in Maluku Province because of various problems that occur such as the difficulty of administrative management such as identity cards, lack of infrastructure and supporting facilities for community activities, control span problems, and various other problems. The feasibility study of Salahutu District to become a new autonomous region has been carried out and in terms of population availability and area has a good level of feasibility. This research is to find out the appropriate location to become the center of the capital of the Ambon Islands Regency based on the availability of regional facilities. The analysis used is the centrality index. This analysis is used by calculating the number of means compared to the population. The results showed that the priority of the central capital of Ambon Islands Regency as a candidate for the new autonomous region of Salahutu District, namely Tulehu Country with a value of 1,168.2 because it has more complete facilities than other villages / countries based on education, health, trade and services, financial institutions and worship. The importance of the results of this research is as a basis if expansion will be carried out and it is necessary to determine the center of the capital, so that the main problems of span of control in Central Maluku can be resolved and provide useful planning for the community.

Keywords: Capital Center, Centrality Index, Salahutu

Abstrak. Pemekaran Kecamatan Salahutu dan Leihitu menjadi calon daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan Ambon telah menjadi isu yang menarik dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Maluku karena berbagai permasalahan yang terjadi seperti sulitnya pengurusan administrasi seperti kartu tanda penduduk, kurangnya prasarana dan sarana pendukung aktivitas masyarakat, masalah rentang kendali, serta berbagai permasalahan lainnya. Kajian kelayakan Kecamatan Salahutu menjadi daerah otonomi baru telah dilakukan dan secara ketersediaan penduduk serta luas wilayah Memiliki tingkat kelayakan yang baik. Penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi yang sesuai untuk menjadi pusat Ibukota Kabupaten Kepulauan Ambon berdasarkan ketersediaan sarana wilayahnya. Analisis yang digunakan yakni indeks sentralitas. Analisis ini digunakan dengan menghitung banyaknya sarana dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Ambon sebagai calon daerah otonomi baru Kecamatan Salahutu yakni Negeri Tulehu dengan nilai yakni 1.168,2 karena memiliki sarana yang lebih lengkap daripada desa/negeri lain berdasarkan sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan juga peribadatan. Pentingnya hasil penelitian ini ialah sebagai dasar apabila akan dilakukan pemekaran dan perlu penentuan pusat ibukota, sehingga permasalahan utama rentang kendali di Maluku Tengah dapat terselesaikan serta memberikan perencanaan yang berguna bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pusat Ibukota, Indeks Sentralitas, Salahutu

How to Cite: Botanri, A. A. A., Polpoke, R. R., & Layn, U. G. (2024). Analisis Penentuan Pusat Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Ambon Sebagai Calon Daerah Otonomi Baru Kecamatan Salahutu. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2 (1), 34-33. <http://doi.org/10.54373/hijm.v2i1.1046>

PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah kota dapat dilihat dari perkembangan penduduk kota yang mempengaruhi suatu kota dengan meluasnya wilayah yang terbangun dan juga tingginya kepadatan penduduk. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh fungsi kota dimana kota mengalami peningkatan kegiatan yang membutuhkan ruang sehingga terjadinya peningkatan prasarana dan sarana wilayah (Tarigan, 2005). Dampak dari berkembangnya suatu kota sehingga menyebabkan terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah, terdapat wilayah-wilayah yang tertinggal dan juga masalah kemiskinan. Ketimpangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari pendapatan perkapita suatu wilayah, kualitas sumber daya manusianya, dan juga ketersediaan prasarana dan sarana wilayah (Daryanto dalam Kurniati, 2010)

Ibukota merupakan suatu pusat kedudukan level pemerintahan baik itu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Selain sebagai pusat pemerintahan, biasanya ibu kota juga memiliki fungsi sebagai pusat politik, perdagangan dan jasa sehingga sangat penting bagi masyarakat. Penetapan atau Pemindahan Ibukota terjadi karena adanya pertimbangan teknis untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masa depan (Pratama, 2018). Pada umumnya, pemekaran suatu wilayah perlu melihat terlebih dahulu hal-hal normatif baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal penting lainnya yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pemindahan suatu Ibu kota adalah aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan untuk turut serta dipertimbangkan sehingga protes penolakan warga dalam pemindahan Ibukota yang seringkali menghiasi daerah-daerah dapat dihindarkan (Hasyim, 2010).

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 disebutkan bahwa untuk melakukan pembentukan kecamatan untuk wilayah Maluku perlu mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk minimal 5000 jiwa, luas wilayah minimal 12,5 km² dan jumlah desa/kelurahan minimal 4. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemekaran di Kecamatan Salahutu karena memiliki luas wilayah kurang lebih 145 km² dan jumlah penduduk kurang lebih 54.000 jiwa, sehingga bisa dipecah menjadi lebih dari 5 kecamatan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Isu pemekaran wilayah yang pernah dibahas di Maluku yaitu tentang pemekaran wilayah Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Salahutu menjadi satu Kabupaten Baru yang diberi nama Kabupaten Kepulauan Ambon. Gunawan Mochtar salah satu anggota DPRD Kota Ambon mendukung rencana tersebut karena dapat berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat (Tribun Ambon, 2021). Hal ini menjadi penting karena seperti yang disebutkan Alfons (2024), masalah

pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah membuat masyarakat kesulitan untuk mengurus KTP dan juga pengurusan administrasi lainnya dan ini merupakan satu dari berbagai macam masalah lainnya.

Berdasarkan hal tersebut sehingga lokasi wilayah Kecamatan Salahutu yang terletak di Pulau Ambon, sangat jauh keberadaannya jika dihubungkan dengan Pusat Pemerintahannya yakni Kota Masohi yang berada di Pulau Seram, sehingga terbentuknya isu pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Kepulauan Ambon tentunya memerlukan kajian untuk menentukan satu lokasi yang layak untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten yaitu pada Kecamatan Salahutu, dan juga penentuan pusat Ibu Kota Kabupatennya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi yang sesuai untuk menjadi pusat Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Ambon berdasarkan ketersediaan sarana wilayahnya. Pentingnya melakukan perencanaan ini karena sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 bahwa struktur ruang berupa sistem jaringan prasarana dan sarana memiliki manfaat sebagai pendukung kegiatan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Sehingga penting mengkaji ketersediaan prasarana dan sarana dalam menentukan Ibu Kota dari kecamatan baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilakukan di seluruh desa/negeri yang terdapat Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Data yang diperlukan adalah data primer yang didapatkan dengan survei secara langsung di Kecamatan Salahutu dan data sekunder yang didapatkan dari informasi yang dibuat pihak lain seperti buku, artikel, peta, dll seperti Kecamatan Dalam Angka, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta dokumen lainnya.

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah peta terkait Kecamatan Salahutu, diantaranya peta administrasi dan peta sebaran sarana. Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni Laptop dengan software ArcGIS 10.7. Teknik analisis yang digunakan yakni indeks sentralitas. Analisis ini merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar dalam suatu wilayah berupa sebaran sarannya yang dikaji dengan jumlah penduduknya untuk mengetahui pusat-pusat pelayanannya (Riyadi, 2003)

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Kecamatan Salahutu

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berada pada wilayah timur laut Pulau Ambon, keberadaan pada kawasan ini memiliki potensi perikanan, dan Pertanian tambak. Lebih dominannya bagian besar dari Kecamatan Salahutu adalah dataran yang saat ini sedang berkembang beberapa aktivitas pertanian dan sektor transportasi dikarenakan wilayah ini merupakan daerah transit untuk menuju ke beberapa pulau seperti Kailolo, Kota Masohi dan wilayah lainnya, serta terdapat beberapa wilayah yang mulai dikembangkan sebagai kawasan perikanan tangkap salah contohnya seperti pada Desa Tulehu. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 6 Desa/Negeri yakni Tulehu, Waai, Liang, Suli, Tengah-Tengah dan Tial. Luas wilayah Kecamatan Salahutu adalah 151,082km² dengan batas administrasi Kecamatan Salahutu yakni sebelah utara berbatasan dengan Selat Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Baguala, sebelah timur berbatasan dengan Selat Haruku dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

Penggunaan lahan di Kecamatan Salahutu terdiri dari permukiman, hutan, perkebunan, hutan mangrove, savana/padang rumput, tanah terbuka, dan peruntukan lainnya. Penggunaan lahan di Kecamatan Salahutu sebagian besar adalah hutan yang masih dominan yakni sebesar 11.179 ha atau 76,76% dari total luas wilayah. Kondisi eksisting wilayah di Kecamatan Salahutu juga menunjukkan bahwa masih sedikitnya pembangunan hampir di setiap desa yang ada di Kecamatan Salahutu, hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan permukiman yang kecil yakni 1.090 ha atau 7,48% dari total luas kecamatan yakni sebesar 14.564 ha.

Pusat pertumbuhan pada Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon berdasarkan jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan digunakan tabel skalogram. Dari hasil perhitungan yang dilakukan akan melahirkan hirarki wilayah yang berpotensi menjadi ibu kota Kabupaten serta menampilkan alternatif yang dapat dijadikan pusat ibukota Kabupaten Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon. Selanjutnya akan diuraikan sarana dan prasana yang di miliki oleh setiap Negeri yang ada dan sudah dihitung berdasarkan jenisnya pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebaran jumlah sarana di Kecamatan Salahutu

No	Negeri Liang			
	Sarana	Jenis	Jumlah Penduduk	Jumlah Unit
1	Pendidikan	SD	8.571	6
		SMP/SLTP		1
		SMA/SLTA		2
2	Kesehatan	Puskesmas		1

3	Perdagangan dan Jasa	Rumah sakit	0
		Pasar	1
		Pertokoan	264
4	Lembaga Keuangan	Bank	1
		Non-Bank	0
5	Peribadatan	Mesjid	6
		Gereja	0
Jumlah		8.571	282

No	Negeri Waai			
	Sarana	Jenis	Jumlah Penduduk	Jumlah Unit
6	Pendidikan	SD	8.341	6
		SMP/SLTP		1
		SMA/SLTA		2
7	Kesehatan	Puskesmas		1
		Rumah sakit		0
8	Perdagangan dan Jasa	Pasar		1
		Pertokoan		213
9	Lembaga Keuangan	Bank		0
		Non-Bank		0
10	Peribadatan	Mesjid		1
		Gereja		3
Jumlah			8.341	228

No	Negeri Tulehu			
	Sarana	Jenis	Jumlah Penduduk	Jumah Unit
11	Pendidikan	SD	19.978	6
		SMP/SLTP		2
		SMA/SLTA		2
12	Kesehatan	Puskesmas		1
		Rumah sakit		1
13	Perdagangan dan Jasa	Pasar		1
		Pertokoan		976
14	Lembaga Keuangan	Bank		4
		Non-Bank		4
15	Peribadatan	Mesjid		16
		Gereja		0
Jumlah			19.978	1.013

No	Negeri Tengah-tengah			
	Sarana	Jenis	Jumlah Penduduk	Jumlah Unit
16	Pendidikan	SD	2.762	1
		SMP/SLTP		0
		SMA/SLTA		0
17	Kesehatan	Puskesmas		0
		Rumah sakit		0
18	Perdagangan dan Jasa	Pasar		0
		Pertokoan		79
19	Lembaga Keuangan	Bank		0

20	Peribadatan	Non-Bank	0
		Mesjid	2
		Gereja	0
Jumlah			2.762
82			
No	Negeri Tial		
	Sarana	Jenis	Jumlah Penduduk
			Jumah Unit
21	Pendidikan	SD	3.236
		SMP/SLTP	3
		SMA/SLTA	1
22	Kesehatan	Puskesmas	0
		Rumah sakit	0
23	Perdagangan dan Jasa	Pasar	0
		Pertokoan	120
24	Lembaga Keuangan	Bank	0
		Non-Bank	0
25	Peribadatan	Mesjid	4
		Gereja	0
Jumlah			3.236
128			
No	Negeri Suli		
	Sarana	Jenis	Jumlah Penduduk
			Jumah Unit
26	Pendidikan	SD	11.359
		SMP/SLTP	6
		SMA/SLTA	3
27	Kesehatan	Puskesmas	2
		Rumah sakit	1
28	Perdagangan dan Jasa	Pasar	0
		Pertokoan	1
29	Lembaga Keuangan	Bank	523
		Non-Bank	2
30	Peribadatan	Mesjid	0
		Gereja	1
Jumlah			11.359
552			

Berdasarkan data jumlah dan jenis sarana pada tabel 1 yang telah dibagi pada masing-masing negeri dan telah di klasifikasikan hanya lima jenis sarana yang dipilih sebagai faktor berpengaruh terhadap penentuan lokasi calon Ibukota Kabupaten Kepulauan Ambon. Berikut tabel 2, dilakukan penentuan calon Ibukota Kabupaten Kepulauan Ambon dengan penentuan nilai indeks untuk mengetahui tingkat kelayakan Negeri-negeri yang ada sebagai kandidat yang layak dan mampu menjadi Ibukota Kabupaten Kepulauan Ambon.

Tabel 2. Analisis indeks penentuan ibu kota calon ibu kota DOB Kab. Kepulauan Ambon

Negeri	Jumlah Jenis Fasilitas					Nilai
	Pendidikan	Kesehatan	Perdagangan dan Jasa	Lembaga Keuangan	Peribadatan	
Liang	9	1	265	1	6	282
Waa	9	1	214	0	4	228
Tulehu	10	2	977	8	16	1.013
Tengah-tengah	1	0	79	0	2	82
Tial	4	0	120	0	4	128
Suli	11	1	524	2	14	552

Keterangan:

Nilai Indeks = Nilai tertinggi – Nilai terendah/Jumlah Kelas

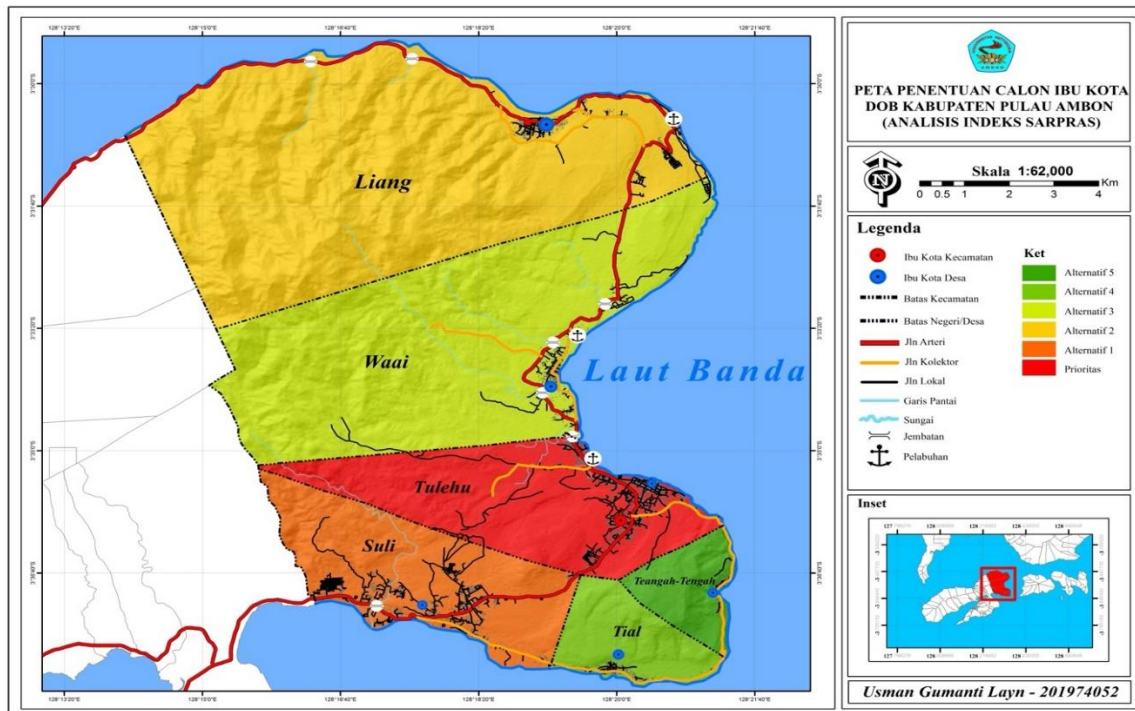
Nilai Indeks = $(1.013 - 82) / 6$

Nilai Indeks = 155,2

Tabel 3. Nilai kategori penentuan Ibu Kota Calon Ibu Kota DOB Kab. Kepulauan Ambon

Negeri	Nilai	Nilai Indeks	Alternatif
Liang	282	437,2	Alternatif II
Waa	228	383,2	Alternatif III
Tulehu	1.013	1.168,2	Prioritas
Tengah-tengah	82	237,2	Alternatif V
Tial	128	283,2	Alternatif IV
Suli	552	707,2	Alternatif I

Berdasarkan analisis indeks penentuan Ibukota Kabupaten Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon, Negeri Tulehu mendapatkan nilai indeks 1.168,2, sedangkan wilayah yang memiliki angka indeks mendekati nilai indeks Negeri Tulehu adalah Negeri Suli dengan nilai mencapai 707,2 artinya bahwa, kedua wilayah tersebut berada pada kategori indeks sangat tinggi yang layak untuk menjadi ibukota Kabupaten. Dari 6 Negeri tersebut, hanya tiga Negeri yang menjadi pertimbangan dalam menjadi kandidat ibukota Kabupaten yakni, Negeri Tulehu, Negeri Suli dan Negeri Liang. Hal tersebut berdasarkan kekuatan dan kelemahan dari wilayah tersebut, memiliki kekurangan kelengkapan sarana pendukung, serta sarana lainnya. Negeri Tengah-tengah mendapatkan nilai indeks terkecil, juga berdekatan dengan Negeri Tial kedua wilayah tersebut sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan calon ibu kota Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) dikarenakan sarana yang kurang memadai dan juga luas wilayah kedua daerah tersebut yang kecil.



Gambar 1. Peta hasil analisis indeks sentralitas

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan, yakni yang menjadi prioritas sebagai pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Ambon sebagai calon daerah otonomi baru Kecamatan Salahutu yakni Negeri Tulehu dengan nilai indeks sentralitas tertinggi yakni 1.168,2 karena memiliki sarana yang lebih lengkap daripada Desa/Negeri yang lain berdasarkan sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan juga peribadatan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.
- Alfons, S. S., Soplanit, M., Bakarbessy, A. D., (2024). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro Volume 6 Nomor 1.
- Hasyim, A., Dharmawan, A. H., Juanda, B. (2010). Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara: Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa. Jurnal Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Volume 4 Nomor 1.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

- Kurniati, A. C., Suharso, T. W. Surjono. (2010). Kajian Disparitas Sebagai Solusi dalam Penentuan Pemilihan Kecamatan Baru Kota Pasuruan. *Jurnal Tata Kota dan Daerah Universitas Brawijaya* Volume 2 Nomor 2.
- Pratama, I. T., Zauhar, S., Rozikin, M. (2018). Penentuan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Stakeholder. *Jurnal Tata Kota dan Daerah Universitas Brawijaya* Volume 10 Nomor 1.
- Riyadi., Bratakusumah, D. S. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tibun Ambon. (2021). <https://ambon.tribunnews.com/2021/11/12/gunawan-mochtar-dukung-rencana-pemekaran-kabupaten-kepulauan-ambon>.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.